

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DI MEDIA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID DAN TEMPO.CO

Framing Analysis of News on Indonesia's Capital Relocation in Republika.co.id and Tempo.co

Edison Bonartua Hutapea; Lasria Sinambela

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina

*Email: bond9167@gmail.com

Abstract: *Online media play an important role in informing and educating the public about Indonesia's capital relocation to East Kalimantan. This qualitative study applies Pan and Kosicki's framing analysis to compare Republika.co.id and Tempo.co coverage of the relocation and the inauguration of the capital's zero point. The analysis examines syntactic, script, thematic, and rhetorical structures. The findings show that Republika.co.id tends to emphasize support for government policy, whereas Tempo.co more strongly foregrounds criticism of the government.*

Keywords: Framing; Capital relocation; Zero-point inauguration; Online media; Qualitative research

Abstrak: Media daring berperan penting dalam menginformasikan dan mengedukasi publik mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis framing Pan dan Kosicki untuk membandingkan pemberitaan Republika.co.id dan Tempo.co tentang pemindahan serta peresmian titik nol ibu kota. Analisis mencakup struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republika.co.id cenderung menonjolkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan Tempo.co lebih kuat mengedepankan kritik terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Framing; Pemindahan ibu kota; Peresmian titik nol; Media daring; Penelitian kualitatif

1. Pendahuluan

Wacana pemindahan ibu kota negara yang awalnya berlokasi di DKI Jakarta dan berpindah lokasi ke Kalimantan Timur, terjadi karena terlalu banyaknya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pemerintah. Pemaparan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di acara Youth Talks pada tanggal 20 Agustus 2019, disampaikan sejumlah permasalahan tersebut meliputi penduduk di Pulau Jawa yang terlalu padat sehingga penyebaran penduduk yang tidak merata di pulau lain, seperti: Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah mendominasi sehingga pulau lainnya pertumbuhan ekonominya tertinggal. Masalah lainnya adalah krisis ketersediaan air yang layak untuk konsumsi masyarakat, kemudian proporsi konsumsi lahan yang sudah dibangun di Pulau Jawa mendominasi bahkan lima kali lipat dari Pulau Kalimantan. Masalah yang begitu kompleks dan sulit diatasi tersebut disebabkan karena perkembangan DKI Jakarta yang tidak seimbang lagi dengan manajemen kota yang kurang baik, dan beban pemerintahan sekaligus pusat bisnis sudah dirasa sangat membebani Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta. Informasi yang bersumber dari Tempo.co (26/08/2019) menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo memilih lokasi ibu kota negara yang baru karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: risiko akan bencana alam yang dinilai sangat minim, lokasinya yang strategis di tengah – tengah wilayah Republik Indonesia, infrastruktur yang relatif lengkap dan telah tersedia, lahan yang cukup luas yaitu: 158 ribu hektar. Selain itu tujuan pemindahan ibu kota negara juga untuk meratakan penyebaran penduduk karena dari tahun ke tahun terjadi lonjakan penduduk yang terus menerus memenuhi Pulau Jawa dan DKI Jakarta, salah satunya untuk mencari pekerjaan guna menyambung kehidupan. Semenjak gagasan ini dicetuskan, banyak pro dan kontra yang muncul dari kalangan masyarakat hingga para pejabat negara. Perdebatan mulai terjadi mengenai seberapa besar total anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, hingga wajah DKI Jakarta kedepannya. Perdebatan-perdebatan dan statement-statement yang bermunculan tentunya tak luput dari liputan berbagai media. Bahkan berita mengenai dampak yang terjadi dari pemindahan lokasi ibu kota negara ini masih beredar luas hingga Februari 2022 di laman website: Republika.co.id dan Tempo.co. Langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo ini tentu cukup menyita perhatian sebagian besar Rakyat Indonesia yang kemudian membuat media-media cetak maupun online menjadi berlomba-lomba untuk melaporkan kabar terkini, terkait dengan pemindahan lokasi Ibu Kota Negara Indonesia. Pemindahan lokasi ibu kota negara bukan hanya sebatas simbol identitas negara saja, akan tetapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Sehingga, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Ibu kota negara baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, menggunakan energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa proses pemindahan ibu kota negara tidak akan memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar, maka dari itu diperlukan partisipasi dari pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menilai, ibu kota negara yang baru harus terbebas dari berbagai bencana alam dan membutuhkan lahan luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai wilayah pengembangan dan sekitar 56 ribu hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri, serta 6.700-an menjadi kawasan inti. "Total ada 256 ribu hektare dan dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan jadi built up area dan 80 persen dibiarkan menjadi hutan. Sehingga, Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi wilayah forest city atau kota hutan," imbuhnya. Klaim atas penundaan Pemilu adalah kemauan masyarakat langsung dibantah Drone Emprit dan lembaga survei

lainnya, yang menyatakan mayoritas masyarakat menolak penundaan Pemilu adalah kredibilitas terpuruk! Namun, lobby-lobby kepada Ketum Parpol mungkin masih akan terus berjalan. Bahkan dapat makin bertambah intens. Semua kekuatan dikerahkan secara all-out sampai berhasil. Untuk itu, masyarakat harus waspada. Tidak boleh lengah sampai Tahun 2024. Terkait ibu kota negara yang bermasalah, meliputi pembahasan dan pengesahan UU yang super cepat, terkesan ada yang ditutup-tutupi/sembunyi-sembunyi, seakan melanggar konstitusi sehingga menuai gugatan dari masyarakat. Konsep otorita melanggar kedaulatan daerah, merebut tanah milik daerah menjadi milik otorita, milik pemerintah pusat: aneksasi. Tidak ada satu orang yang cukup normal bisa mengerti pemindahan ibu kota negara yang penuh misteri ini. Softbank juga tidak mengerti, tidak tertarik terlibat di Nusantara, dimungkinkan juga marah dijadikan bahan marketing dan pencitraan terus-menerus akhirnya terbongkar juga. Pemindahan ibu kota negara ternyata masalah proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan ada bagi-bagi kapling. Kemudian, petinggi konglomerat ditunjuk sebagai nakhoda Nusantara. Dia berasal dari Group Sinar Mas. Konglomerat yang sangat dekat dengan kekuasaan. Isunya bahkan sudah “menguasai” penguasa, apa hal itu benar? Makanya, kasus kebakaran hutan selesai dengan “damai”? Dan investasi ke beberapa perusahaan startups anak presiden Joko Widodo juga sangat lancar? Sikap kritis Tempo.co terhadap pemberitaan kebijakan pemerintah terkait pemindahan IKN juga dibuktikan dalam data yang dikumpulkan Lembaga survei Lingkaran Suara Publik (LSP). LSP menggelar survei terkait tingkat persetujuan masyarakat soal pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Melalui survei yang dilakukan pada tanggal 7-20 Februari 2022, hasilnya menunjukkan bahwa 27 persen lebih publik setuju soal pemindahan Ibu Kota Negara. Sebanyak 9,5 persen publik sangat setuju dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sedangkan sebanyak 21,4 persen menyatakan netral. Kemudian sebanyak 23,8 persen publik tidak setuju atas perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sebanyak 10,5 persen juga menyatakan sangat tidak setuju atas perpindahan tersebut. Sebanyak 7,1 persen responden menyatakan tidak menjawab/tidak tahu. Survei dilakukan terhadap 1.230 sample responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Survei diambil melalui sesi wawancara langsung dengan bantuan kuisioner. Ada pun margin of error hasil survei ini adalah 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 95 persen. Berkaitan dengan fenomena tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana framing media terkait pemberitaan pemindahan IKN Baru. Penelitian ini diberi judul “Analisis Framing Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Media Online Republika.co.id dan Tempo.co”. Peneliti akan melakukan metode analisis framing di Republika.co.id dan Tempo.co. kedua media tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena selain sikap media yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait pemindahan IKN Baru seperti yang dipaparkan sebelumnya, Republika.co.id dan Tempo.co juga media online yang dikenal jujur dan independen. Keduanya juga termasuk media online di Indonesia yang telah terdaftar di dewan pers dan sering diakses khalayak. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana framing pemberitaan kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara di media online Republika.co.id dan Tempo.co?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang mengikuti panduan, aturan, serta langkah-langkah yang digunakan agar mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara umum, aturan dan langkah tersebut dikenal sebagai metodologi penelitian. Menurut pandangan Krisyantono (2006), terdapat dua metodologi yang digunakan, yaitu: kualitatif dan kuantitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui sebuah objek penelitian secara lebih mendalam sekaligus mengetahui aspek-aspek yang ingin diketahui dalam penelitian secara lebih seksama. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Danial dan Nanang (2009) yang menyatakan bahwa metode ini dari aspek fenomenologis menuntut pendekatan secara menyeluruh atau mendudukkan sebuah kajian dalam konstruksi ganda serta melihat sebuah objek dari sisi alaminya.

3. Kerangka Teoretis

Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita itu (Eriyanto, 2020). Sementara Todd Gitlin, (dalam Eriyanto, 2020) mendefinisikan framing adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa tersebut ditampilkan dalam pemberitaan agar terlihat menonjol dan dapat menarik perhatian khalayak pembaca. Frame merupakan prinsip dari seleksi, penekanan, dan peresentasi dari realitas. Menurut Gitlin, (Eriyanto, 2020) Frame adalah bagian yang pasti hadir dalam praktik jurnalistik.

“Lewat frame, jurnalis mengemas peristiwa yang kompleks tersebut menjadi peristiwa yang dapat dipahami, dengan perspektif tertentu dan lebih menarik perhatian khalayak. Laporan berita dari wartawan pada akhirnya ditulis oleh wartawan yang akhirnya menampilkan apa yang dianggap penting, apa yang perlu ditonjolkan, dan apa yang perlu disampaikan oleh wartawan kepada khalayak (Eriyanto, 2002).”

Berbagai definisi framing di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media. Akhirnya, pemaknaan setiap peristiwa atau isu tertentu bisa jadi akan sangat berbeda. Seperti yang disampaikan Eriyanto (2002), Perbedaan tersebut muncul karena realitas pada dasarnya bukan ditangkap dan ditulis, realitas sebaliknya dikonstruksi. Proses konstruksi tersebut ada banyak penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda dalam memahami realitas. Efek yang ditimbulkan pada pembacanya pun akan berbeda-beda.

4. Hasil dan Pembahasan

Media massa memiliki peran dalam menyebarluaskan informasi terkait rencana pemindahan ibu kota negara dan peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara menjadi penting. Pemberitaan yang disampaikan melalui media massa akan

menentukan sikap masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan pemindahan ibu kota negara dan peresmian titik nol IKN. Media massa dianggap sebagai lembaga yang netral. Media massa akan selalu berada dalam tarik ulur antara berbagai kepentingan yang semuanya bersumber dari kepentingan politik dan ekonomi.

Dalam masyarakat kapitalis, media massa memiliki posisi strategis, penting dan menciptakan hegemoni karena media massa telah memperoleh kebebasan penuh. Terkait pemindahan ibu kota negara dan peresmian titik nol IKN, semestinya media massa harus menjadi badan independen yang melaporkan kebijakan pemerintah dan berfungsi sebagai “anjing penjaga” bagi masyarakat (Hadi, Wahjudianata, & Indrayani, 2020).

Kajian penelitian ini berfokus pada tiga kategori, yaitu kronologi, kebijakan dan tanggapan pihak eksternal. Ketiga kebijakan ini dipilih penulis karena penulis berusaha mendapatkan bagian terbesar di media massa. Berita ini dijadikan sampel penelitian berfokus pada tanggal 16 – 19 Agustus 2019, awal perencanaan pemindahan ibu kota negara. Pada periode tanggal 10 – 18 Maret 2022 adalah peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara. Periode tersebut berita terkait kronologi, kebijakan dan tanggapan pihak eksternal sedang hangat dan terus diliput atau diberitakan Republika.co.id dan Tempo.co.

Di media massa, framing menjadi aspek atau alat kognitif yang digunakan untuk menyajikan fakta-fakta atau informasi kepada masyarakat luas, mulai dari mengidentifikasi kode, menjelaskan, hingga cara menyajikannya. Setiap media memiliki konsep dalam membingkai berita untuk menentukan berita yang mana yang akan ditonjolkan agar pembaca lebih memperhatikan informasi yang dibingkai (Eriyanto, 2002).

Berdasarkan hasil analisis, terdapat perbedaan framing Republika.co.id dan Tempo.co. Hasil analisis komparatif dari ketiga kerangka kebijakan tersebut dapat dilihat secara singkat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Frame Republika.co.id mengenai pemindahan dan peresmian titik nol IKN Nusantara

Struktur	Aspek Berita	Uraian Analisis
Sintaksis	Kebijakan pemindahan IKN	Republika.co.id memaparkan bahwa pemerintah memindahkan ibu kota negara. Berita ini diawali dengan judul, lead dan penutup. Lead menjelaskan bahwa Presiden Jokowi meminta izin kepada anggota DPD dan DPR untuk memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Ini demi visi Indonesia maju. Dalam berita yang lebih ditonjolkan adalah kutipan dan pernyataan.
Sintaksis	Peresmian titik nol IKN	Republika.co.id menjelaskan peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara dan mengadakan prosesi ritual untuk menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi seluruh Indonesia yang melambangkan kebhinekaan Indonesia sekaligus melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita ibu kota negara (IKN) Nusantara. Dalam berita yang lebih dominan adalah kutipan langsung dari narasumber dan pernyataan.
Sintaksis	Tanggapan eksternal 1	Berdasarkan pemberitaan artikel di atas Republika.co.id bermaksud memberi pandangan terkait perencanaan pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari headline berita yang digunakan “Oesman Sapta Odang ketua DPD dukung pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan”. Wartawan menggiring publik atau pembaca bahwasanya banyak yang mendukung kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara.
Sintaksis	Tanggapan eksternal 2	Berdasarkan pemberitaan di atas Republika.co.id ingin memaparkan terkait peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara. Judul atau headline yang disajikan bernada positif dan netral. Lead meringkas apa yang menjadi isi pemberitaan. Isi pemberitaan merupakan informasi.
Skrip	Kebijakan pemindahan IKN	Berita ini ditulis dengan menggunakan struktur piramida terbalik (inverted pyramid) unsur 5W+1H ditulis dengan lengkap. Unsur yang paling menonjol adalah what, who dan why untuk menguatkan pemerintah dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke pulau Kalimantan.
Skrip	Peresmian titik nol IKN	Narasi yang disajikan atau ditulis lengkap dalam unsur 5W+1H. Aspek yang paling menonjol who dan what dalam berita. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendominasi narasumber yang dihadirkan oleh Republika.co.id, tidak diimbangi dengan menampilkan dua sisi dalam pemberitaan atau sering disebut dengan cover both side.
Skrip	Tanggapan eksternal 1	Unsur yang tidak terdapat dalam berita yaitu how. Unsur what menjelaskan apa yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu pemindahan ibu kota negara. Unsur who menjelaskan siapa yang mendukung kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara (IKN). Berikutnya unsur when merupakan waktu wawancara Minggu, 18 Agustus 2019, unsur where merupakan lokasi wawancara dan lokasi ibu kota negara baru. Unsur why menjelaskan mengapa ibu kota negara dipindahkan. Unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur who dan why.

Tabel 1: Frame Republika.co.id mengenai pemindahan dan peresmian titik nol IKN Nusantara (lanjutan)

Struktur	Aspek Berita	Uraian Analisis
Skrip	Tanggapan eksternal 2	Unsur what yang paling menonjol dijelaskan dalam kutipan dan pernyataan. Unsur who menjelaskan siapa saja yang turut menghadiri peresmian titik nol IKN dan melakukan prosesi ritual kendi Nusantara di IKN. Unsur when menjelaskan kapan diadakannya peresmian titik nol IKN, selanjutnya unsur where menekankan di mana diadakan peresmian IKN. Unsur why memaparkan mengapa menggunakan prosesi ritual kendi acara dalam peresmian titik nol IKN dan prosesi kendi Nusantara yang mengumpulkan tanah dan air dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.
Tematik	Kebijakan pemindahan IKN	Terdapat dua tema besar dalam berita ini, yang paling menonjol yaitu, (1) Jokowi minta izin ke parlemen DPD & DPR untuk memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan (2) Pemerintah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan yaitu ketua DPD Oesman Sapta Odang, Perkumpulan Profesor Lingkungan Dukung Pemindahan Ibu Kota, dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto
Tematik	Peresmian titik nol IKN	Dalam berita terdapat tiga tema besar yang ditonjolkan adalah, (1) Pelantikan Kepala (Bambang Susantono) dan Wakil Kepala (Dhony Raharjo) Otorita IKN. (2) Melaksanakan prosesi ritual penyatuan air dan tanah Nusantara dari 34 provinsi di Indonesia di lokasi titik nol IKN. (3) Ibu kota negara (IKN) akan dibangun dengan konsep green dan forest city.
Tematik	Tanggapan eksternal 1	Berita artikel ini memiliki dua tema. Tema pertama adalah rencana pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Tema kedua terkait potensi kebakaran hutan dan wilayah Kalimantan
Tematik	Tanggapan eksternal 2	Berita ini dikonstruksi setidaknya dua tema. Tema atau topik yang pertama yaitu peresmian titik nol IKN dengan adanya prosesi ritual kendi Nusantara yang menyatukan tanah dan air seluruh Indonesia. Yang kedua pembangunan IKN Nusantara yang berkonsep kota hutan, kendaraan ramah lingkungan.
Retoris	Kebijakan pemindahan IKN	Ungkapan tertulis yang mengandung aspek leksikon yang paling di highlight dalam berita ini misalnya kata “demi visi Indonesia maju” dan “Indonesia hidup selamalamanya” yang memiliki arti atau konotasi yang positif sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara IKN. Terdapat unsur grafis atau foto yang menggambarkan isi dalam berita
Retoris	Peresmian titik nol IKN	Terdapat unsur grafis atau foto dan leksikon pada kata “cita-cita besar”, “pekerjaan besar”, dan “tonggak sejarah”.
Retoris	Tanggapan eksternal 1	Berita ini menonjolkan unsur grafis atau foto, di mana foto yang disajikan Republika.co.id tidak berupa foto ilustrasi. Unsur leksikon terdapat pada kata “terserah Presiden”, “efek domino”, “tertangani” dan “Indonesia hidup selamalanya”
Retoris	Tanggapan eksternal 2	
Frame	Kebijakan pemindahan IKN	Presiden Jokowi izin ke parlemen untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) kepada parlemen, dan kebijakan ini disambut baik atau mendapat dukungan dari beberapa institusi ataupun kalangan.
Frame	Peresmian titik nol IKN	Peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara, Melaksanakan prosesi ritual penyatuan air dan tanah Nusantara dari 34 provinsi di Indonesia di lokasi titik nol IKN. Serta IKN akan dibangun dengan konsep green dan forest city.
Frame	Tanggapan eksternal 1	Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) presiden Jokowi minta izin ke parlemen dan rencana pemindahan IKN ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti ketua DPD Oesman dan dari perkumpulan profesor se- Indonesia
Frame	Tanggapan eksternal 2	Peresmian titik nol IKN Nusantara melakukan prosesi ritual kendi Nusantara yang menyatukan tanah dan air dari seluruh Indonesia dan membangun IKN dengan konsep kota hutan dan kendaraan ramah lingkungan.

Tabel 2: Frame Tempo.co mengenai pemindahan dan peresmian titik nol IKN Nusantara

Struktur	Aspek Berita	Uraian Analisis
Sintaksis	Kebijakan pemindahan IKN	Berdasarkan analisis sintaksis, Tempo.co memaparkan terkait perencanaan pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Dalam pemberitaan terdapat headline, lead, dan penutup. Kutipan yang paling ditonjolkan adalah kajian yang komprehensif terkait pemindahan IKN. Kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) mendapat respon kontra.

Tabel 2: Frame Tempo.co mengenai pemindahan dan peresmian titik nol IKN Nusantara (lanjutan)

Struktur	Aspek Berita	Uraian Analisis
Sintaksis	Peresmian titik nol IKN	Tempo.co menjelaskan pelaksanaan peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara dan mengadakan prosesi ritual kendi Nusantara untuk menyatukan tanah dan air dari seluruh provinsi yang ada Indonesia. Prosesi ritual tersebut melambangkan kebhinekaan Indonesia sekaligus melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita ibu kota negara (IKN) Nusantara. Dalam berita yang lebih dominan adalah kutipan langsung dari narasumber dan pernyataan.
Sintaksis	Tanggapan eksternal 1	Tempo.co menyampaikan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) ke pulau Kalimantan. Presiden Jokowi meminta izin ke parlemen untuk pindahkan ibu kota negara. Kebijakan pemerintah tersebut mendapat tanggapan kontra dari Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR, mendapat kritikan terkait pemindahan IKN dari Sigit Sosiantomo sebagai wakil ketua komisi V DPR RI dan Prof Emil Salim guru besar Fakultas Ekonomi UI. Dalam pemberitaan terdapat headline, lead, dan penutup. Selanjutnya yang paling ditonjolkan adalah kutipan dan pernyataan.
Sintaksis	Tanggapan eksternal 2	Analisis sintaksi dalam berita, Tempo.co menginformasikan pelantikan kepala dan wakil kepala Otorita IKN serta pelaksanaan peresmian titik nol IKN dan adanya prosesi ritual kendi Nusantara menyatukan tanah dan air dari seluruh Indonesia. Kutipan dan pernyataan mendominasi pemberitaan tersebut dan dilengkapi dengan headline, lead dan penutup. Peresmian titik nol IKN tentunya mendapat tanggapan pro dan kontra.
Skrip	Kebijakan pemindahan IKN	Unsur what paling dominan dalam pemberitaan tersebut disampaikan dalam kutipan dan pernyataan. Unsur who menjelaskan beberapa narasumber dalam berita seperti Presiden Jokowi, wakil ketua DPR Fahri Hamzah, wakil ketua komisi V DPR Sigit Sosiantomo dan guru besar fakultas ekonomi UI Prof. Emil Salim. Unsur why menjelaskan mengapa ibu kota negara dipindahkan. Unsur how bagaimana proses pemindahan IKN, berikutnya unsur where dan when merupakan tempat melakukan wawancara dan waktu.
Skrip	Peresmian titik nol IKN	Dalam berita ini unsur what menjadi yang lebih dominan yaitu peresmian titik nol (IKN) Nusantara dan prosesi ritual kendi Nusantara. Unsur who merupakan narasumber dalam berita. Unsur where adalah tempat dilaksanakan nya peresmian titik nol (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan Jakarta. Unsur when adalah waktu pelaksanaan peresmian IKN 14 Maret 2022. Selanjutnya unsur why yaitu mengapa melaksanakan ritual kendi saat peresmian titik nol, unsur how bagaimana proses peresmian IKN dan prosesi ritual IKN.
Skrip	Tanggapan eksternal 1	Unsur skrip dalam pemberitaan ini dilengkapi dengan 5W+1H. Who, why dan what merupakan unsur yang paling ditonjolkan yaitu narasumber yang memberikan tanggapan terhadap peresmian titik nol dan prosesi ritual kendi Nusantara. Unsur what menjelaskan apa tanggapan dari narasumber dalam berita. Berita diimbangi dengan menampilkan dua sisi dalam pemberitaan.
Skrip	Tanggapan eksternal 2	Narasi berita artikel tersebut disajikan atau ditulis lengkap dalam unsur 5W+1H. Aspek yang paling menonjol who dan what dalam berita. Narasumber yang dihadirkan oleh Republika.co.id, diimbangi dengan menampilkan dua sisi dalam pemberitaan, yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) narasumber yang mendominasi dalam berita namun diimbangi dengan narasumber yang lain seperti Nasrullah Antropolog Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan.
Tematik	Kebijakan pemindahan IKN	Pemberitaan yang menyorot sosok pemerintahan Presiden Jokowi, secara tidak langsung jelas terlihat pada tema pertama. Yang kemudian ditegaskan dari kutipan langsung narasumber terkait perencanaan pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Presiden Jokowi meminta izin ke parlemen pindahkan IKN.
Tematik	Peresmian titik nol IKN	Tema dalam pemberitaan ini memiliki dua tema yang pertama peresmian titik nol IKN Nusantara sekaligus mengadakan prosesi ritual kendi Nusantara yang menyatukan tanah dan air se Indonesia. Tema kedua terkait lima polemik IKN: 1.Mematok tanah warga Kalimantan 2.Pembangunan IKN berpotensi menggeser 20 ribu masyarakat adat Kalimantan. 3.Undang-undang IKN cacat publik 4.Potensi pelanggaran ham 5.Pemindahan IKN menyisakan permasalahan yang ada di ibu kota Jakarta
Tematik	Tanggapan eksternal 1	Pemberitaan ini mengandung dua tema yang paling ditonjolkan, (1) tema Presiden Jokowi meminta izin ke parlemen pindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. (2) beberapa instansi tidak mendukung rencana pemindahan IKN, dipertegas dari kutipan langsung narasumber Fahri Hamzah menyatakan “Riset Bappenas dangkal betul” saat diwawancarai pada jumat 16 Agustus 2019

Tabel 2: Frame Tempo.co mengenai pemindahan dan peresmian titik nol IKN Nusantara (lanjutan)

Struktur	Aspek Berita	Uraian Analisis
Tematik	Tanggapan eksternal 2	Terkait pemberitaan peresmian titik nol IKN Nusantara dan prosesi ritual kendi penyatuan tanah dan air seluruh Indonesia. Untuk menguatkan tema tersebut wartawan mencantumkan kutipan, pernyataan dan data dari narasumber menjadi tema utama dalam berita. Tema kedua pemindahan IKN menuai polemik dan kontra dari berbagai kalangan. 1.
Retoris	Kebijakan pemindahan IKN	Terdapat ungkapan yang digunakan Tempo.co yang mengandung unsur leksikon yaitu “Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selamalamanya” yang mendukung unsur sintaksis dalam berita.
Retoris	Peresmian titik nol IKN	Tempo.co secara general atau keseluruhan menggunakan unsur leksikon yang terdapat pada kata “berisiko”, “bukti sejarah”, “berisiko” dan “benda asing”. Sementara unsur metafora “smart green zero carbon”, “Insya Allah”, “hidayah dan barakoh” “Allah subhanahu wa ta’ala”.
Retoris	Tanggapan eksternal 1	Berita yang dimuat oleh Tempo.co disajikan dalam bahasa Umum dan mudah dimengerti oleh pembaca. Tidak mengandung unsur metafora dalam pemberitaan tersebut. Unsur grafis atau foto yang lebih menonjol.
Retoris	Tanggapan eksternal 2	Pada artikel berita ini Tempo.co menonjolkan unsur foto sebagai penguat informasi yang ingin dijelaskan atau dipaparkan. Ungkapan yang ditulis “mengadaada”, “catatan kritis” dan “menyayangkan” sebagai koheren atas unsur sintaksis dan tematik.
Frame	Kebijakan pemindahan IKN	Kebijakan pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke pulau Kalimantan, merupakan langkah pembangunan pemerataan ekonomi dan demi Indonesia maju.
Frame	Peresmian titik nol IKN	Peresmian titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara dan mengadakan prosesi ritual kendi Nusantara yang menggabungkan tanah dan air dari seluruh provinsi Indonesia merupakan langkah dari kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara.
Frame	Tanggapan eksternal 1	Tempo.co membingkai kebijakan pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke pulau Kalimantan menuai pro dan kontra. Hal ini diperkuat dari narasumber yang dipilih oleh tempo.co yaitu Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR dan sigit Sosiantomo sebagai wakil ketua komisi V DPR. Menolak pemindahan IKN.
Frame	Tanggapan eksternal 2	Pemerintah meresmikan titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara sekaligus mengadakan prosesi ritual kendi Nusantara di mana seluruh gubernur se Indonesia membawa tanah dan air untuk digabungkan di titik nol IKN. Hal ini tentunya menuai pro dan kontra.

5. Kesimpulan

Di media massa, framing menjadi aspek atau alat kognitif yang digunakan untuk menyajikan fakta-fakta atau informasi kepada masyarakat luas, mulai dari mengidentifikasi kode, menjelaskan, hingga cara menyajikannya. Setiap media memiliki konsep dalam membingkai berita untuk menentukan berita yang mana yang akan ditonjolkan untuk disampaikan kepada pembaca. Republika.co.id memiliki framing kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke daerah Kalimantan, dan peresmian titik nol IKN Nusantara. Melalui unsur sintaksis, Republika.co.id menonjolkan bahwa Presiden Jokowi meminta izin ke parlemen untuk pindahkan ibu kota negara dan peresmian titik nol sekaligus mengadakan prosesi ritual kendi untuk menyatukan tanah dan air se-Indonesia yang ditanam di titik nol sebagai simbol kebhinekaan. Tempo.co memiliki framing kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dan peresmian titik nol IKN Nusantara. Melalui unsur sintaksis, Tempo.co menonjolkan kritik terhadap kebijakan Presiden Jokowi pindahkan ibu kota negara dan peresmian titik nol serta pelaksanaan prosesi ritual kendi untuk menyatukan tanah dan air se- Indonesia simbol kebhinekaan.

Daftar Pustaka

- Alex, S. (2009). Analisis teks media. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anwar, A., Mulyana, D., & Cangara, H. (2005). Ilmu komunikasi. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachtar, A. Y., Perkasa, D. H., & Sadikun, M. R. (2016). Peran Media Dalam Propaganda. KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 13(2).
- Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects. Communication Research, 3(1), 3–21.
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1966). Social Construction of Reality: A treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Double Day & Company. Inc.
- Birkerts, S. (1994). The Gutenberg elegies: The fate of reading in an electronic. Age, 129.
- Bungin, B. H. M. (2006). Sosiologi komunikasi: teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat. Language, 19(395p), 24cm.
- Damayanti, S., Putra, D. K. S., & Mayangsari, I. D. (2016). Framing Analysis of News About Jakarta ' S Northern Coast Reclamation on. E-Proceeding of Management, 3(3), 3928– 3936. <https://libraryeproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/3785>
- Danial, E. (n.d.). Nanang. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pkn UPI.

- De Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. *Information Design Journal+ Document Design*, 13(1), 51–62.
- Eriyanto. (2002). Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media. LKiS.
- Gerbner, G. (1967). Newsmen and schoolmen: The state and problems of education reporting. *Journalism Quarterly*, 44(2), 211–224.
- Hadi, I. P. (n.d.). dkk.(2021). Komunikasi Massa. Pasuruan: Qiara Media.
- Halik, A. (2013). Komunikasi massa.
- Hariyanti, P. (2006). New Propaganda Model: Pertarungan Wacana Politik dalam Bisnis Media. *Jurnal Komunikasi*, 1(1), 31–40.
- Heychael, M., & Sarwono, B. K. (2015). Hakikat Komunikasi Massa Dan Era Informasi. Modul Komunikasi Massa. Jakarta.
- HM, Z. (2011). The Journalist. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Junita, F., & Syas, M. (2017). Perbandingan Frame Berita tentang Kasus Korupsi Proyek Pengadaan KTP Elektronik Antara Surat kabar Kompas dan Koran Tempo. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 1(01).
- Kriyantono, R., & Rakhmat, S. J. (2006). Metode penelitian komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- McQuail, D. (1985). Sociology of mass communication. *Annual Review of Sociology*, 93–111.
- Moleong, Lexi J., & Edisi, P. (2004). Metodologi penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- Mutua, S. N., & Oloo Ong'ong'a, D. (2020). Online news media framing of COVID-19 pandemi: Probing the initial phases of the disease outbreak in international media. *European Journal of Interactive Multimedia and Education*, 1(2), e02006.
- Nazir, M. (2005). Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75.
- Rakhmat, J. (2000). Retorika modern: pendekatan praktis. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Reese, S. D. (1991). Setting the media's agenda: A power balance perspective. *Annals of the International Communication Association*, 14(1), 309–340.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*. Nuansa Cendekia.
- Shoemaker, P. J. (1996). *Reese Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. USA, Longman Publ.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the message*. White Plains, NY: Longman.
- Sobur, A. (2012). Analisis Teks Media, Cet 6. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sofian, A., & Niken, D. (2021). Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 (Analisis framing model Robert N. Entman pada media online Koran. tempo. co Edisi Maret 2020). 19 (2), 58–70. *Commicast*, 2(1), 58–70.
- Stamm, K. R., & Bowes, J. E. (1990). *The mass communication process: A behavioral and social perspective*. Kendall Hunt Publishing Company.
- Straubhaar, J., La Rose, R., & Davenport, L. (2009). *Media Now: Understanding Media, Culture and Technology* 6th edition. USA: Wadsworth Cengage Learning University of Twente.
- Subarsono, A. G. (2005). Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif, dan Non-Partisan. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Wibisono, I. (2020). Analisis Framing Pemberitaan COVID-19 pada Koran Kompas: Edisi Januari 2020. *Jurnal Aspikom*, 5(2), 219–231.